

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

¹Nur Hasna, ²Mutmainnah

^{1,2}Teknik Sipil, Universitas Lamappapoleonro

^{1,2}Jalan Kesatria No. 60 Watansoppeng, Botto Kecamatan Lalabata, Soppeng Sulawesi Selatan-Indonesia

e-mail : ¹hasnaunipol@gmail.com, ²mutmainnah@unipol.ac.id

JTEKSIL

Abstrak

Kata Kunci :

Pengembangan;
Infrastruktur;
Sosial Ekonomi
Wilayah.

Pembangunan kawasan permukiman di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, belum terpenuhinya pelayanan dasar dan sarana prasarana permukiman, keterisolasian wilayah, dan sebagainya. Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah yang perlu kita tuntaskan bersama. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam merespon tantangan tersebut serta mendukung pencapaian tujuan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2022 Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yang didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial EkonomidanWilayah. Secara prinsip, Kegiatan pelatihan Infrastruktur berupaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendayagunaan potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat Kawasan Permukiman melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Peran serta masyarakat, yang dalam kegiatan ini direpresentasikan oleh Penyelenggara Swakelola tingkat masyarakat memiliki posisi penting dalam menggerakkan roda pembangunan di wilayahnya masing-masing. tujuan Penelitian Kegiatan Infrastruktur ini adalah sebagai petunjuk, arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Infrastuktur baik secara teknis maupun administratif serta untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah pelaksanaan di lapangan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penelitian Kegiatan Infrakstruktural program dan kegiatan ini diucapkan banyak terima kasih

Keywords:

Development;
Infrastructure;
Regional Socio-Economic.

Abstract

The development of residential areas in Indonesia is still faced with various challenges such as the low level of welfare and quality of life of the community, the unfulfilled basic services and infrastructure for settlements, regional isolation, and so on. This condition is homework that we need to complete together. Various efforts continue to be made by the government as a form of commitment in responding to these challenges and supporting the achievement of urban and rural environmental goals that are in accordance with a good, sustainable life, and are able to provide added value for the community according to the mandate of Law No. 1 of 2011. In line with this According to this, in 2022 the Ministry of PUPR through the Directorate General of Human Settlements is committed to carrying out Community-Based Infrastructure (IBM) activities from the Directorate of Settlement Area Development, which includes activities for the Development of Socio-Economic and Regional Infrastructure. In principle, Infrastructure training activities seek to accelerate and improve the quality of infrastructure development, increase the utilization of local potential, and empower the people of Settlement Areas through a

participatory development approach. Community participation, which in this activity is represented by community level Swakelola Organizers, has an important position in moving the wheels of development in their respective regions. The purpose of this Infrastructure Activity Research is as a guide, direction and guideline in the implementation of Infrastructure Activities both technically and administratively as well as to equalize perceptions and steps for implementation in the field. Thank you very much to all those who have helped in the Research on Infrastructural Activities of this program and activity.

© 2022

Universitas Lamappapoleonro

PENDAHULUAN

Jenis dan lokasi pembangunan infrastruktur dipilih berdasarkan prioritas yang memiliki manfaat terbesar bagi Kawasan, sehingga Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Penyangga mempunyai kedudukan yang setara. Lokasi Pembangunan Infrastruktur tidak harus di Desa pusat Pertumbuhan, namun bisa juga dibangun di desa penyangga, tergantung analisis terhadap prioritas kebutuhan Infrastruktur, asas manfaat, dan jumlah pemanfaat terbesar di Kawasan.

Harmonisasi Kelembagaan dilakukan melalui penguatan kemampuan kelembagaan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan BKAD yang tanggap terhadap persoalan pengembangan potensi local yang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peningkatan Kerjasama antar desa penerima manfaat dengan membentuk BKAD untuk mengoptimalkan proses perencanaan partisipatif. Penguatan kapasitas kemampuan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan kelembagaan pendukung kegiatan dengan menjalin koordinasi.

Rencana kegiatan Penelitian Infrastruktur guna mendukung dan menyediakan atau meningkatkan Infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala Kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah serta terjalannya harmonisasi rencana pembangunan Kawasan diantaranya dengan rencana pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang pada Wilayah Kabupaten tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintah Desa, Badan Kerja Sama antar Desa (BKAD) merupakan kelembagaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang proses pembentukannya atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa. Tujuan kegiatan penelitian Infrastruktur sosial ekonomi melakukan peningkatan kualitas dan pembangunan Infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian alam, fungsi dan peranan Kawasan serta keterpaduan infrastruktur dalam Kawasan perdesaan untuk meningkatkan sosial ekonomi melalui pendekatan partisipasi masyarakat. Sasaran terbangunnya Infrastruktur dasar skala Kawasan perdesaan guna mendukung peningkatan akses terhadap pelayanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan dan pengembangan ekonomi lokal, meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Infrastruktur dan mendayagunaan sumber daya lokal dalam pembangunan Desa Samaenre Kab. Bone.

TINJAUAN PUSTAKA**Komponen dan Kriteria Kerja**

Peningkatan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia ditingkat kecamatan, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Infrastruktur agar mampu membangun kesadaran kritis dan kemandirian, menciptakan situasi yang kondusif dan sinergi yang positif dalam Menyusun rencana pengembangan Kawasan terpilih. Pembangunan Infrastruktur Kawasan, komponen pembangunan infrastruktur Kawasan merupakan hasil dari proses dua komponen kegiatan di atas, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi wilayah. Kriteria pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan bersifat terbuka dalam jenis, komponen, dan kuantitasnya namun harus memenuhi kriteria.

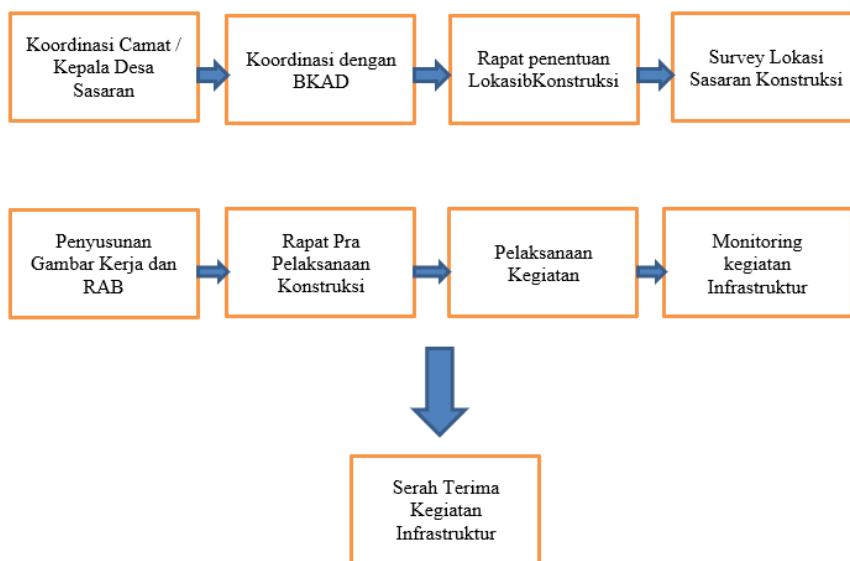
Jenis Infrastruktur

Pelaksanaan kegiatan infrastruktur dilakukan pada Kawasan perdesaan yang merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan diantaranya sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan dan peningkatan jalan meliputi : jalan lingkungan, jalan poros, jalan produksi, dan bangunan pelengkap (talud, gorong-gorong, drainase, dll). Jenis konstruksi jalan yang dapat dibangun berupa perkerasan batu belah, perkerasan aspal, perkerasan (paving block) dan perkerasan jalan beton. Infrastruktur Air Minum dapat berupa peningkatan dan rehabilitasi sumur gali, sumur pompa tangan, bangunan penangkap air, perlindungan mata air, bak penampung air hujan, pengelolaan air permukiman, dan instalasi pengolahan air sederhana.

METODE PENELITIAN**Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan penting yang dikerjakan dengan memulai koordinasi dengan Pemerintah setempat berikut tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Adapun penjelasan gambar diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Peneliti melakukan Koordinasi Bersama Camat atau Kepala Desa sasaran
- 2) Setelah koordinasi dengan Camat/Kepala Desa, Peneliti akan menentukan perwakilan warga desa yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur yang disebut BKAD
- 3) Setelah menentukan penanggung jawab BKAD selanjutnya dilakukan pertemuan Rapat bersama Camat, Kepala Desa, dan warga, membahas lokasi yang layak mendapatkan bantuan infrastruktur.
- 4) Selanjutnya peneliti bersama Kepala Desa dan BKAD akan melakukan survey lokasi dari hasil penentuan rapat.
- 5) Setelah survey lokasi selanjutnya peneliti akan membuat gambar kerja beserta RAB atau Rancangan Anggaran Biaya.
- 6) Setelah gambar kerja dan Rab selesai berikutnya akan dilanjutkan dengan rapat pra konstruksi dimana pada rapat ini peneliti akan memaparkan metode kerja konstruksi sesuai gambar kerja yang telah dibuat.
- 7) Setelah melakukan rapat pra konstruksi maka penanggung jawab atau BKAD akan siap membangun konstruksi yang telah direncanakan sesuai gambar kerja.
- 8) Peneliti akan memonitoring kegiatan Infrastruktur yang dikerjakan sesuai perencanaan gambar kerja
- 9) Setelah pembangunan kerja sudah sesuai dengan perencanaan maka akan dilakukan serah terima pekerjaan oleh BKAD ke Camat / Kepala Desa setempat.

Metode Pengumpulan Data

- 1) Metode Observasi
Dengan melakukan Pengukuran langsung di lokasi sasaran. Dari hasil observasi peneliti dapat memperoleh data-data yang nantinya akan menjadi referensi dalam pembuatan Gambar kerja dan Rab baik dalam perencanaan dan penyusunan laporan penelitian.
- 2) Koordinasi
Dalam pengambilan data lokasi survey Infrastruktur di Desa Samanrae Kab. Bone maka peneliti harus koordinasi bersama Kepala Desa menyangkut lokasi yang layak untuk di mendapatkan bantuan.
- 3) Studi Pustaka
Pengumpulan Data dengan cara mempelajari petunjuk teknis, artikel, jurnal, yang relevan dan mendukung dalam proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survey dan Analisis Data

Pada tahapan ini kami melakukan survei tempat penelitian pada Samaenre Kab. Bone. Selain melakukan survei kami juga melakukan pengambilan data. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil survei dan pengambilan data dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2. Survey Lokasi Jalan

Desain Sistem

Pada lokasi survey jalan ditentukan untuk membangun jalan model paving blok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Samanre Kabupaten Bone.



Gambar 3. Hasil Pembangunan Jalan

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat sudah mampu membangun Infrastruktur seperti jalan tani dan pemasangan paving blok
2. Masyarakat sudah mampu mengelola pembangunan yang akan dilaksanakan pada Desa tersebut.

SARAN

Untuk meningkatkan Infrastruktur yang ada di Desa-desa maka pihak pemerintah setempat harus lebih memperhatikan lagi kebutuhan jalan dan kantor yang akan mendapatkan bantuan

UCAPAN TERIMA KASIH

dengan terlaksananya penelitian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Lamappapoleonro yang telah menerima penelitian ini dan memberikan dana penelitian anggaran tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadiwardoyo, S. P., dan Fikri, H. 2013. *Use of Buton Asphalt Additive on Moisture Damage Sensitivity and Rutting Performance of Asphalt Mixtures*. 3(3), 100-109.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Prasetya, D. I., Nuraini, I., & Kusuma, H. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya Dan Listrik Terhadap Pdrb Di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(2), 233–246. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i2.14016>
- Rachman, D. N. (2020). Analisa Infrastruktur Saluran Pembuangan Air Limbah Eksisting di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. *Jurnal Teknik Sipil*, 9(1), 16–24. <https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v9i1.265>
- Rokhmat, A., Sasana, H., SBM, N., & Yusuf, E. (2020). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Jalan Provinsi, Air Bersih, Hotel, Penginapan Dan Restoran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 70. <https://doi.org/10.26623/jreb.v13i2.2598>
- Wiguna, G. C., & Cahyono, A. B. (2017). Pemilihan Lokasi Pengolahan Air Limbah di Kota Surabaya Berdasarkan Unit Pengembangan Menggunakan Metode Spatial Multi Criteria Evaluation. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 2–5. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24180>
- .